

Konflik dan Resolusi: Peristiwa Berdarah di Tapanuli Masa Revolusi

Edward Silaban*, Suprayitno, Nuhung

*Program Studi S2 Ilmu Sejarah, Universitas Sumatera Utara
Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara - Indonesia

*Alamat korespondensi: edwarsilaban01@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v8i2.58980>

Diterima/Received: 19 Oktober 2023; Direvisi/Revised: 21 April 2024; Disetujui/Accepted: 24 April 2024

Abstract

After the proclamation of Indonesian independence on August 17, 1945, the resistance to the formation of the Republic of Indonesia among local rulers in East Sumatera, including the kings in Tapanuli, revealed the opposite. The kings and sultans was still adamant in maintaining their position and did not want to switch from an autocracy system to a democratic system because during local rulers were given many special privileges by the Dutch. Utilizing historical methods encompassing heuristic, verification, interpretation and historiography, as well as using the concept of revolution, to reveal causes and trajectory of the bloody events in Tapanuli during the Revolution. This study reveals that the violent incident in Tapanuli was driven by the Pesindo troops and the unionist from East Sumatra targeting the local kings. The resolution of the bloody conflict involved Tentara Republik Indonesia (TRI) and also traditional reconciliation as well as traditional reconciliation practices such as buffalo slaughtering and communal feasting.

Keywords: Tapanuli; Bloody Incident; Revolution; Conflict Resolution; Local Authority.

Abstrak

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, berita proklamasi tersebut sampai di Sumatera Timur dan ternyata menimbulkan respons negatif bahwa banyak penguasa-penguasa lokal yang tidak mendukung pembentukan Negara Republik Indonesia, termasuk raja-raja di Tapanuli. Sikap para raja dan sultan masih bersikukuh untuk mempertahankan posisinya sebagai penguasa dan tidak mau beralih dari sistem autokrasi ke sistem demokrasi. Hal itu disebabkan bahwa pada masa kolonialisme para penguasa lokal tersebut telah banyak diberikan hak istimewa oleh Belanda. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi, serta menggunakan konsep revolusi untuk menjelaskan secara kronologis penyebab terjadinya peristiwa berdarah di Tapanuli pada masa revolusi serta jalannya proses revolusi di Tapanuli dan penyelesaian konflik secara adat dalam persoalan peristiwa berdarah di Tapanuli tersebut. Peristiwa berdarah di Tapanuli dimotori oleh Laskar Pesindo bersama Persatuan Perjuangan dari Sumatera Timur yang dikirim ke wilayah Tapanuli untuk melancarkan aksi pembunuhan terhadap raja-raja lokal di Tapanuli. Penyelesaian konflik berdarah di Tapanuli juga diselesaikan melalui perang fisik oleh TRI dan juga secara adat istiadat melalui penyembelihan kerbau dan dimakan secara bersama-sama.

Kata kunci: Tapanuli; Revolusi Sosial; Peristiwa Berdarah; Penyelesaian Konflik.

Pendahuluan

Revolusi sosial telah mengakibatkan banyak pembunuhan, pembantaian, dan kekacauan di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Sumatera Timur dan Tapanuli bahwa selama terjadinya revolusi sosial, ratusan orang-orang penting dan intelektual dari Sumatera dibantai dengan tidak memenuhi rasa kemanusiaan.

Ratusan pribumi ditangkap dan dijebloskan di kamp-kamp, meskipun setelah melalui pemeriksaan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Menurut badan perjuangan Nasionalis Pemuda Indonesia (NAPINDO) bahwa salah satu sebab timbulnya revolusi sosial disebabkan karena Pangreh Praja tidak mendapat informasi yang jelas dari pemerintah pusat dan provinsi mengenai kebijaksanaan politik Jakarta dan janji kerja sama

saling menghormati antara Pangreh Praja dan republik yang diucapkan Sukarno dalam konferensi pangreh praja tahun 1945 (Lucas 2019).

Pada masa Pasca-Proklamasi ternyata beberapa daerah tidak mendukung proklamasi kemerdekaan tersebut, khususnya daerah Sumatera Timur dan Tapanuli yaitu para penguasa tradisionalnya. Sikap para raja dan sultan masih kuat untuk mempertahankan posisinya sebagai penguasa dan tidak mau beralih dari sistem autokrasi ke sistem pemerintahan demokrasi. Pada masa kolonial, penguasa lokal digunakan untuk membantu tugas Belanda seperti memungut pajak, menyediakan tenaga kerja dan menduduki jabatan penting sehingga posisi tersebut menguntungkan bagi mereka dan mendukung Belanda untuk tetap berkuasa. Pelaksanaan berbagai tugas disertai dengan pemberian hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa (Ricklef 2005). Para raja sering menyalahgunakan kekuasaannya sehingga menimbulkan kerugian bagi kalangan masyarakat (Kahin 2013).

Di masa kolonial sebelumnya, Tapanuli merupakan wilayah taklukan Belanda yang disebut sebagai Keresidenan. Keresidenan Tapanuli adalah wilayah administrasi Hindia Belanda yang berdiri tahun 1834 setelah Jawa terlebih dahulu di kuasai. Pada masa Hindia Belanda, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kabupaten Dairi dan Toba Samosir yang sekarang masuk dalam wilayah keresidenan Tapanuli yang dipimpin seorang residen bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Keresidenan Tapanuli yang disebut *Residentie Tapanuli* terdiri atas empat *afdeeling* (kabupaten) yaitu *Afdeeling* Batak Landen, *Afdeeling* Padangsidempuan, *Afdeeling* Sibolga dan *Afdeeling* Nias. Keresidenan Tapanuli menjadi wilayah kekuasaan Kolonial Belanda kemudian memisahkan seluruh wilayah Tapanuli dari Keresidenan Sumatera Barat, dan membentuk sebuah keresidenan baru yakni Keresidenan Tapanuli. Tapanuli Resmi menjadi sebuah keresidenan utuh dan mempunyai pemerintahan sendiri sejak 1 Januari 1906, dan Sibolga dijadikan sebagai ibukota dari Keresidenan Tapanuli (Silalahi 2012).

Sejak perubahan status tersebut, terdapat pembagian wilayah lagi ke dalam lingkup yang lebih kecil yakni *Afdeeling* Batak yang dipimpin

seorang Asisten Residen dengan ibukotanya Tarutung yang terdiri atas lima *onderafdeeling* (kecamatan) yaitu: (1) *Onderafdeeling* Silindung ibukotanya Tarutung; (2) *Onderafdeeling Hoovlakte Van Toba* (wilayah Humbang) ibukotanya Siborong-borong; (3) *Onderafdeeling* Toba ibukotanya Balige; (4) *Onderafdeeling* Samosir ibukotanya Pangururan; (5) *Onderafdeeling* Dairi Landen ibukotanya Sidikalang (Simanjuntak 2006).

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah republik membentuk struktur pemerintahan baik dipusat dan didaerah. Dengan diangkatnya Dr. Ferdinand Lumbantobing sebagai residen Tapanuli pada tanggal 04 Oktober 1945 (Langenberg 1976), disusunlah struktur pemerintahan dalam negeri di Tapanuli sebagai berikut: (1) Nama *Afdeeling* Batak Landen diganti menjadi Luhak Tanah batak dan sebagai Luhak pertama diangkat Cornelis Sihombing; (2) Nama *onderafdeeling* diganti menjadi Urung dipimpin Kepala Urung, Para Demang memimpin *onderafdeeling* sebagai Kepala Urung; (3) *Onder Distrik* diganti menjadi Urung Kecil dan dipimpin Kepala Urung Kecil yang dulu disebut Asisten Demang.

Belanda menganggap penguasa pribumi Tapanuli sebagai pejabat yang mempertahankan hak-hak istimewannya, terutama kedudukan dalam adat dimata rakyat. Bagi Belanda, Pangreh Praja adalah pegawai anti nasionalis yang mengendalikan keamanan dan ketertiban melalui jaringan mata-mata dan informan. Kepala Desa dan pamong desa bertugas sebagai pengumpul pajak. Kenaikan pangkat pangreh praja tergantung pada laporan dan penilaian atas kemampuannya mengumpulkan pajak, kemampuan mengelola administrasi dan mengawasi kriminalitas (Agustono 2019).

Memasuki masa pemerintahan Jepang, dilakukan pencabutan hak istimewa terhadap kaum bangsawan yang disertai dengan adanya peralihan kepemilikan lahan perkebunan oleh para buruh. Oleh karena itu, mereka tidak senang dan tidak antusias menyambut proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Tapanuli, sehingga berharap untuk mendapatkan hak-haknya kembali dengan menyambut kedatangan Belanda kembali pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, dampaknya juga membuat mereka semakin

menjaukan diri dari pihak pro-republik (Utomo 1995).

Revolusi sosial yang terjadi pada Maret 1946 dengan berbagai aksi pembuahan, perampokan dan penjarahan yang dilakukan memicu para pemimpin revolusi yakni para laskar rakyat yang tergabung dalam Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan berafiliasi dengan Persatuan Perjuangan (Volksfront) bentukan Tan Malaka serta Nasionalis pemuda Indonesia (Napindo) cabang Tapanuli untuk terus bergerak. Melalui Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Tapanuli meminta para raja dan kaum bangsawan menyesuaikan sistem pemerintahannya ke sistem demokrasi. Namun, seruan itu dihiraukan dan memilih untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Atas dorongan kelompok Persatuan Perjuangan yang dikirim dari Sumatera Timur terjadilah penyerangan terhadap kaum bangsawan.

Kajian mengenai peristiwa sekitar Revolusi Fisik di Tapanuli belum banyak dilakukan. Namun, untuk mengetahui konteks peristiwa sekitar masa Revolusi di Indonesia, ada beberapa kajian yang dapat dijadikan rujukan. Kajian yang dilakukan Reid (2012) menyatakan bahwa revolusi sosial di Sumatera Timur dan Aceh dipelopori oleh golongan pemuda yang ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan, tetapi tidak ada titik penyelesain dalam aksi revolusi di Sumatera Timur, sehingga ketegangan juga tetap berlangsung setelah terjadinya peristiwa. Selanjutnya kajian dari Wahyuni (2019) menjelaskan bahwa peristiwa revolusi di daerah Siak justru sangat berbeda jauh dengan yang terjadi di Sumatera Timur, bahkan para Sultan Siak yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah diumumkan. Penelitian dari Sabrina (2022) juga menarik untuk ditilik. Ia menjelaskan bahwa peristiwa revolusi di wilayah Tanah Karo sangat jauh berbeda dari wilayah Sumatera Timur pada umumnya. Jalannya peristiwa revolusi di wilayah Tanah Karo justru sangat tenang dan tidak ada pembunuhan berdarah kepada kepala-kepala Urung Karo, tetapi hanya pengambilalihan tanah-tanah milik penguasa Karo untuk dinasionalisasi. Hal tersebut terjadi karena sistem kekerabatan (*Mergasilima*) yang kuat di Tanah Karo. Lain halnya di Tapanuli, jalannya peristiwa berdarah di Tapanuli adalah akibat dari proses revolusi yang

berlangsung di Sumatera Timur hingga ke wilayah Tapanuli sebagai dampak penolakan kekuasaan oleh penguasa lokal yang menerapkan sistem swapraja warisan pemerintah kolonial. Hal itu membangkitkan amarah para kaum pergerakan yang kemudian dikirim dari Sumatera Timur ke Tapanuli untuk melakukan dekolonisasi. Revolusi sosial ditujukan untuk membersihkan pengaruh Pemerintah Kolonial Belanda yang sudah mendarah daging di kalangan penguasa lokal di Tapanuli. Dengan gerakan pembersihan tersebut, maka pengaruh Kolonial Belanda akan terkikis dan kekuasaan turun-temurun akan berakhir lewat peristiwa berdarah.

Namun, Kajian mengenai Peristiwa Berdarah di Tapanuli ini dapat di lihat secara ekspilit dalam rumusan masalah yakni (1) Apakah faktor penyebab terjadinya peristiwa berdarah di Tapanuli (2) Bagaimana proses terjadinya peristiwa berdarah di Tapanuli (3) Bagaimana proses penyelesaian konflik berdarah di Tapanuli.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan dengan tujuan untuk melakukan proses secara kritis dari arsip dan dokumen masa lampau. Tahap pertama *heuristik* yaitu proses pengumpulan sumber data primer dan skunder, kedua disusul kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan penelusuran dan penyeleksian dokumen, sumber primer diperoleh dari penelitian di Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Arsip yang ditemukan berupa dokumen Netherlands Indies Civil Administration (NICA), koran-koran sezaman, laporan Ferdinan Lumban Tobing dan inventaris arsip Tapanuli lainnya Selain itu untuk sumber skunder, penulis menelusuri koleksi antikuarian yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa *Mimbar Umum*, buku-buku lama, tesis, maupun literatur yang relevan.

Otoritas Lokal di Tapanuli

Tapanuli memiliki beberapa wilayah *Afdeeling Batak Landen* (Tanah Batak) yang terdiri atas lima *Onderafdeeling* yaitu *Onderafdeeling* Silindung,

Onderafdeeling Toba, *Onderafdeeling* Samosir, *Onderafdeeling* Dairi, *Onderafdeeling* Barus. *Onderafdeeling* Silindung beribukota di Tarutung. Tentu kerajaan dalam masyarakat tradisional Batak Toba pra kolonialisme tidak memiliki suatu susunan pemerintahan yang sama seperti yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Jawa atau seperti kerajaan-kerajaan di negara Eropa. Pemerintahan kerajaan yang pernah ada dalam masyarakat tradisional Batak Toba, seperti Harajaon Bius dan Harajaon Dinasti Singa Mangaraja, sangat berbeda baik dalam hal bentuk dan pembentukannya, strukturnya, kekuasaannya, aturannya maupun ideologi yang mendasarinya (Langenberg 1976).

Pemerintahan dalam masyarakat Batak tradisional merupakan perpaduan antara organisasi formal dengan kerohanian agama dan kekerabatan adat istiadat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Batak tradisional. Pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional merupakan pemerintahan berdasarkan religi dan adat. Religi dan adat menjadi landasan dan ideologi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau kerajaan tradisional Batak Toba. Tetapi ketika pemerintah kolonial menguasai Indonesia, lambat laun birokrasi tradisional mulai digantikan oleh birokrasi kolonial (Silalahi 2012). Residen Tapanuli terdiri atas sembilan Kabupaten, 23 Kewedanan dan 59 Kecamatan dengan susunan sebagaimana Tabel 1.

Setiap distrik ini dipimpin oleh kepala kampung (*huta*). Dimasa prakolonial distrik ini dipimpin oleh seorang kepala kuria, maka setelah jabatan kepala kuria dihapuskan (1915), lalu dipegang seorang yang berkedudukan sebagai kepala negeri (*negeri hoofd*). Pengangkatan kepala-kepala negeri ini selalu berdasar pada pertimbangan latar belakang bekas penguasa tradisional. Walaupun diadakan pemilihan, tetap memperhatikan faktor historis keturunannya yang berasal dari raja-raja tradisional. Di setiap *huta* diangkat pula kepala kampung (Castles 2001).

Sebenarnya para kepala negeri dan kepala kampung yang diangkat ini statusnya bukanlah sebagai pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi mereka diberikan perannya untuk mengutip pajak pendapatan setiap penduduk yang ada dikawasannya. Mereka diberikan bagian-bagian persentase dari hasil pungutan pajak atau

belasting/rodi. Bila seorang kepala keluarga tidak mampu membayar *belasting* maka dapat menggantinya dengan menyumbangkan tenaga kerjanya secara rodi. Khusus kepala negeri selain memperoleh hasil persentase jumlah pajak yang dikutipnya maka setiap tahun, kepala negeri akan memperoleh honor perangsang (*insentif*) dari pemerintah Kolonial Belanda yang disebut sebagai *Yaarlijkse Beloning*.

Otoritas lokal di Tapanuli umumnya tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah residen pada masa Kolonial Belanda. Kepala pemerintahan Keresidenan dipimpin oleh seorang residen. Jabatan residen biasanya diisi oleh orang-orang Belanda sendiri dan seorang residen memiliki kuasa terhadap seluruh wilayah yang berada di wilayah keresidenannya. Seorang residen biasanya dibantu oleh asisten residen yang berkuasa di tiap-tiap *Afdeeling*. Wilayah Tapanuli memiliki empat *Afdeeling*, itu berarti di Tapanuli terdapat empat orang asisten residen yang akan membantu seorang residen dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, untuk menertibkan penduduk lokalnya maka peran para otoritas lokal ditonjolkan oleh para pejabat kolonial untuk membantu mereka.

Pada tingkat ketiga dalam pemerintahan Tapanuli ada *controleur* yang bertugas sebagai kepala pemerintahan di wilayah *onderafdeeling*. Masing-masing *onderafdeeling* memiliki satu orang *controleur* yang bertugas di masing-masing wilayah yang dibawahinya. Jabatan residen, asisten residen, ataupun *controleur*, berada ditangan bangsa Belanda dan merupakan pegawai kolonial. Tiap-tiap kontrolir mempunyai mitra seorang pejabat yang berasal dari bangsa Indonesia yang digaji oleh pemerintah. Mitra itu disebut dengan Demang. Dengan kata lain, Demang merupakan pegawai pemerintahan tetapi berasal dari rakyat pribumi. Tiap-tiap *onderafdeeling* hanya memiliki satu buah distrik (setingkat kewedanaan), yang berarti hanya ada satu Demang yang berkuasa di setiap *onderafdeeling* (Castles 2001).

Dalam menjalankan tugasnya, demang dibantu oleh Asisten Demang. Asisten Demang juga merupakan pegawai negeri pribumi yang digaji oleh pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari orang-orang pribumi. Jumlah Asisten Demang berbeda-beda berdasar pada jumlah *onderdistrik* yang ada di tiap-tiap wilayah distrik.

Di *Afdeeling* Tanah Batak, Jaihutun menjadi pemimpin adat non-pemerintah tipe pertama yang memiliki kuasa satu tingkat di bawah Asisten Demang. Ketika Belanda berhasil menguasai Nusantara, sejak saat itu pula kehidupan masyarakat di Nusantara diatur dan ditentukan oleh keadaan politik yang berlangsung di Belanda maupun di Eropa sendiri. Berbagai macam kebijakan diterapkan oleh Belanda di Nusantara hanya untuk mencari keuntungan bagi pihak Belanda sendiri, sedangkan rakyat dibiarkan mengalami penderitaan yang menyengsarakan (Husni 1983).

Sementara pihak Pro-Republik yaitu kaum pergerakan mendesak agar sistem pemerintahan swapraja/kerajaan dihapuskan dan digantikan dengan pemerintahan demokrasi. Namun, pihak pro-republik sendiri terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu pertama merupakan golongan moderat yang menginginkan pendekatan kooperatif untuk membujuk kaum bangsawan dan kubu kedua yaitu kubu radikal yang mengutamakan jalan kekerasan dengan penggalangan massa para buruh perkebunan. Dengan reaksi tersebut, kubu radikal bergerak melangsungkan revolusi dan terjadilah revolusi sosial di Sumatera Timur hingga menyebar ke Tapanuli dengan tujuan mengambil alih kekuasaan dan menumpas para raja-raja dan bangsawan yang dianggap mendukung masuknya kembali pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia (Reid 2012; Bottomore 2006).

Situasi Tapanuli Pasca-Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta tidak secara serentak dapat diterima oleh tiap-tiap daerah termasuk di Tapanuli yang memperoleh berita proklamasi beberapa minggu setelahnya. Hal ini disebabkan alat komunikasi ketika itu berada dalam pengawasan Jepang, sehingga pada awal kemerdekaan tidak ada surat kabar di Tapanuli yang menyiarkan berita proklamasi karena setiap daerah yang akan diberitakan atau dimuat terlebih dahulu diseleksi oleh *Bunkaka* (Kantor penerangan militer Jepang). Berita proklamasi kemerdekaan sampai di Tapanuli setelah Tengku Muhammad Hasan dan M. Amir tiba dan bermalam di Tarutung menemui Dr. Ferdinan

Lumbantobing dalam rangka memberikan instruksi pada 28 Agustus 1945 (Halimiaty 2008).

Pada 29 Agustus 1945 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang tepat untuk memberitahukan proklamasi kemerdekaan karena banyak masyarakat berkumpul di lapangan. Syariful Alamsyah mengumpulkan stafnya untuk pengumuman berita proklamasi yang sudah pasti yang diterima Ferdinan Lumban Tobing dari Tengku Muhammad Hasan sebelumnya. Pengumuman berita proklamasi bertempat di lapangan Simare-mare, sehingga banyak rakyat Tapanuli yang berkumpul baik beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Selanjutnya setelah perayaan Idul Fitri selesai, Syariful Alamsyah naik ke atas podium dan mengumumkan "*Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 yang lalu*".

Sukarno-Hatta telah memproklamkan kemerdekaan Indonesia, oleh karena itu diperintahkan kepada seluruh rakyat Sibolga-Tapanuli sesudah pulang dari tempat ini segera memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Indonesia sudah merdeka, kita tidak mau dijajah lagi" (Revolusioner 1946).

Setelah pidato Syariful Alamsyah selesai, rakyat pulang kerumahnya seakan-akan mendapat jiwa baru, jiwa merdeka dan keinginan untuk berjuang sehingga situasi kota menjadi bertambah panas. Pada malam harinya serdadu Jepang diperintahkan untuk menangkap Syariful Alamsyah dengan alasan dianggap membuat kekacauan. Namun karena ia memiliki pengalaman dimasa sebelumnya, ia melarikan diri dan mengadakan rapat tertutup dengan teman seperjuangan untuk membentuk sebuah badan Komite Nasional Indonesia di Tarutung sebagai ibukota Keresidenan Tapanuli sehingga lebih mudah dalam menyebarkan berita kemerdekaan keseluruh penjuru daerah di Keresidenan Tapanuli. Selain Dr. F.L. Tobing terdapat juga Abdul Hakim dan Sutan Naga (Asnan 2007).

Selanjutnya pihak pro-republik segera membentuk badan-badan perjuangan seperti Napindo, Pesindo dan Persatuan Perjuangan yang berperan penting dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Pada umumnya badan-

badan ini sulit disebut organisasi karena struktur organisasi kaum muda biasanya mengelompok diri pada seorang tokoh tua yang kharismatik. Kepemimpinan badan perjuangan terdiri dari tiga kelompok. Pertama, Angkatan 26 terdiri atas bekas anggota Sarikat Islam, Sarekat buruh Kereta Api, PKI lama dan sarekat rakyat. Kelompok kedua disebut Angkatan 30 termasuk para pemuda sebelum perang, dari Indonesia Muda, Kepanduan Bangsa Indonesia, atau Perpri (Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia) yaitu ormas pemudanya Partindo, Gerindo, PSII dan PNI Baru. Kelompok ketiga, generasi Muda Angkatan “45” yang memperoleh pengalaman politik dari organisasi-organisasi pemuda buatan Jepang yang pandangannya dibentuk oleh pengalaman masa pemerintahan Jepang. Termasuk dalam kelompok ini adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Keanggotaan badan-badan perjuangan ini tidak ketat dan bisa merangkap. Banyaknya badan perjuangan akibat dampak pendudukan Jepang menimbulkan perbedaan dalam pergerakan Kemerdekaan (Lucas 2019, 118). Di Tapanuli, mereka kemudian terbagi dalam beberapa keanggotaan laskar yaitu sebagai berikut.

1) Nasionalis Pemuda Indonesia (Napindo)

Pembentukan BKR pada 5 Oktober 1945 dibarengi dengan lahirnya kelaskaran. Setiap golongan masyarakat memiliki laskarnya sendiri. Badan-badan laskar ini muncul di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pembentukan laskar pada saat itu tidak dilarang oleh pemerintah republik, karena tentara reguler masih sangat terbatas. Kehadiran laskar tidak hanya menjadi sarana perlawanan melainkan juga menjadi identitas kelompok dan tempat bertahan hidup pemuda. Perkembangan selanjutnya, badan-badan perjuangan ini berafiliasi dengan partai-partai-politik. Tindakan tersebut artinya mempertahankan kemerdekaan sekaligus menjaga kepentingan kekuatan politik yang diikutinya (Kahin 2013, 209).

Para laskar dan tentara berjuang bersama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan kolonialisme Belanda yang ingin menguasai kembali Tapanuli. Hal ini dikarenakan apabila melihat pada kondisi Tapanuli dimasa kolonial bahwa daerah ini sempat menjadi wilayah penghasil kopi terbesar untuk di ekspor ke Eropa

sehingga Belanda dan Sekutu berusaha masuk kembali ke Tapanuli. Para pemuda membentuk organisasi-organisasi non politik yang berencana membantu keamanan dan bertujuan membentuk laskar-laskar. Organisasi itu disebut Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Terbentuk BPI sejak 15 Oktober 1945 kemudian berganti nama menjadi Nasionalis Pemuda Indonesia (Napindo) yang kemudian berafiliasi dengan partai nasional Indonesia (PNI) (Rocamora 1991). Perubahan nama tersebut mengikuti badan perjuangan yang ada di pulau Jawa. Setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik pada bulan November 1945.

PNI sebagai partai politik dan Ideologi dari Napindo memilih sikap anti fasis dan anti kolonialisme serta mengambil peran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk melakukan revolusi dan dekolonisasi. Setelah keluarnya maklumat Wakil Presiden Hatta pada 3 November 1945” berbunyi: “*menganjurkan supaya rakyat membentuk partai-partai dengan restriksi bahwa partai itu hendak memperkuat perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan rakyat*”. Setelah diresmikan pembentukan laskar dengan alasan perjuangan nasional lewat diplomasi tidak akan berhasil tanpa perjuangan rakyat di desa dan kota. Napindo salah satunya diharapkan akan bisa menyatukan semua organisasi militer dan mendukung TKR dalam perjuangan fisik melawan kolonialisme (Kahin 2013, 207).

2) Pemuda Sosialis Indonesia

Pada 10 November 1945, atas inisiatif Menteri Pertahanan, Amir Syarifuddin, diadakan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia pertama di Yogyakarta. Kongres ini bertujuan menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia dalam satu wadah dan melahirkan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI). Sebanyak 28 organisasi pemuda melakukan fusi ke dalam BKPRI, dan tujuh organisasi lainnya berfusi ke dalam Pesindo yaitu Angkatan Pemuda Indonesia (API), Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI), Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GERPRI), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Angkatan Muda Pos Telegraph dan Telepon (AMPTT), Angkatan Muda Kereta Api (AMKAA) dan Angkatan Muda Gas dan Listrik. Pesindo

merupakan salah satu fraksi pemuda terbesar pada masa revolusi yang aktif dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu laskar yang memiliki basis massa besar dan luas adalah laskar Pesindo. Tugas Pesindo melakukan perlawanan bersenjata terhadap musuh yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia. basis massanya di beberapa kota seperti Malang, Surabaya, Jember, Bojonegoro, Madiun, Jogjakarta, Surakarta, Semarang, Jakarta, Bandung, dan Medan. Persenjataan yang dimiliki Laskar Pesindo diperoleh dari sisa senjata pasukan Jepang dan merampas persenjataan pihak Inggris dan Belanda.

Struktur organisasi Pesindo memiliki tugas untuk melakukan perlawanan secara militer terhadap musuh serta membantu tentara dalam bertugas. Fleksibilitas kerja Pesindo ini juga terjadi di Tapanuli yang di pimpin oleh Raja Saul Lumban Tobing. Para pemuda Pesindo juga turut serta dalam pertempuran Medan Area yang berlangsung dari Oktober 1945 hingga akhir 1946. Selain bertempur melawan Jepang dan Sekutu, Pesindo juga melakukan operasi militer pengamanan perang, pengamanan wilayah, fasilitas umum, hingga aset-aset seperti perkebunan dan pabrik. Pendirian Pesindo dimaksudkan untuk membantu tentara dalam melawan agresi Belanda (Fahsin 2010).

Pemuda-pemuda yang tersebar di Tapanuli sebelumnya tergabung dalam organisasi PRI. Mereka menganggap bahwa Pesindo mewakili semangat persatuan pemuda di Indonesia dengan skala nasional. Pertimbangan atas *common identity* inilah yang mengilhami PRI di Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli untuk mengubah nama menjadi Pesindo. Namun sebenarnya relasi dengan Pesindo di Jawa tidak terjalin dalam sebuah korespondensi langsung, dikarenakan keterbatasan komunikasi dan koordinasi yang masih sangat sulit (Merdeka 1946).

Pesindo di wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli terkenal agresif seperti melakukan serangkaian tindakan kejahatan perang, perampokan, penjarahan hingga pembunuhan. Demikian pula dengan pola aksi dan struktur organisasinya yang berbeda, sehingga mereka dikenal dengan julukan "Pasukan Kelima Pesindo" dan "Pasukan Gagak Hitam". Julukan ini memiliki

makna sebagai satuan yang menganggap diri mereka sebagai satuan "elite" Pesindo dari Sumatera Timur dimana jumlahnya mencapai 50.000 personil. Tindakan-tindakan Pesindo Sumatera Timur tentu kontras dengan pernyataan Pesindo Jogjakarta dalam memandang tindakan pembunuhan dan penjarahan yang tertulis dalam majalah Revolusioner pada 1946. "*Soal terror jang dilakoean oleh Belanda djoega beloem dapat diachiri: Pembakaran kampoeng-kampoeng tetap meradjalela, belum lagi pemboenoehan-pemboenoehan terhadap rakjat djelata dan perkosaan-perkosaan terhadap kaoem wanita.*" (Revolusioner 1946).

3) Persatuan Perjuangan

Maklumat Pemerintah No. X, 1 November 1945 yang dikeluarkan dengan KNIP ditentang oleh Tan Malaka yang menganjurkan penyitaan semua aset milik musuh di Indonesia. Tan Malaka tidak setuju dengan pembentukan partai-partai dan organisasi yang berlainan ideologi sehingga sulit dipersatukan. Tan Malaka mengundang semua partai dan laskar untuk membentuk kerjasama dalam satu federasi dalam satu program perjuangan dan terikat oleh kepentingan bersama.

Rapat pembentukan Persatuan Perjuangan dilakukan di Demak dan Yogyakarta pada 1 Januari 1946. Pada 3-5 Januari 1946 berlangsung kongres Persatuan Perjuangan yang pertama di Porwokerto yang dihadiri oleh 138 organisasi rakyat. Semua peserta mendapat undangan pribadi dari panitia penyelenggara atau melalui organisasi yang diwakilinya. Mereka yang berangkat antara lain pemimpin pusat partai-partai, Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, Serindo, Masyumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Revolusioner Indoneia (Partindo), organisasi-organisasi pemuda dan pejuang Pesindo, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Hizbullah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Angkatan Muda Republik Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Pemuda Republik Indonesia, Federasi Perempuan Persatuan Wanita Indonesia (Perwari) dan tentara. Selain itu hadir juga semua lapisan rakyat melengkapinya semuanya itu, termasuk panglima besar Sudirman dan Tan Malaka (Ihsanuddin 2010).

Dalam kongres dibahas berbagai permasalahan dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam pidatonya Tan Malaka menyuarakan pentingnya persatuan untuk menyatukan seluruh hasrat rakyat Indonesia melalui suatu badan yaitu Persatuan Perjuangan Rakyat (*volkfront*) dengan program minimum (Poeze 2008).

Adapun hasil kongres ini yaitu: (1) Nasionalisasi struktur sosial ekonomi dari Belanda dan Jepang yang mempunyai perindustrian, perkebunan dan pengangkutan kapital internasional dan modern; (2) Dalam status yang kurang dari 100 persen, kemerdekaan mengatur perindustrian berat dan ringan untuk pembangunan dan pertahanan negara Republik Indonesia; (3) Menolak semua status yang kurang dari 100 persen kemerdekaan seperti status dominan, *gemeenbest*, otonomi *commonwealth* atau *trustee ship*.

Persatuan Perjuangan Sumatera dipimpin oleh Sarwono Sastrosutardjo dengan sekretaris Nathar Zainuddin. Setelah Persatuan Perjuangan Sumatera terbentuk dipimpin oleh Sarwono Sastrosutardjo dengan sekretaris Nathar Zainuddin maka diadakan konferensi yang ditegaskan bahwa Pucuk Pimpinan Persatuan Perjuangan Sumatera harus berbeda karakternya dengan Persatuan Perjuangan Jawa. Konferensi ditutup dengan menghasilkan resolusi yang memuat empat poin penting yaitu: (1) Kantor pusat administratif akan didirikan di ibukota Sumatera; (2) Di Tapanuli akan dibentuk dewan investigasi dan dewan adjudikasi; (3) Front Populer akan menjadi pendukung penguatan kembali dari pemerintah Republik dan setia kepada Pemerintah Sjahrir atas dasar kesatuan keseluruhan dari Indonesia; (4) Revolusi sosial harus dilakukan dengan prinsip dari satu pemerintahan, satu rakyat dan satu tentara (Tobing 1997).

Konflik Berdarah di Tapanuli

Salah satu faktor pemicu terjadinya peristiwa berdarah di Tapanuli karena adanya pengaruh revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Timur. Pada awal Kemerdekaan, Sumatera terdiri atas tiga wilayah yaitu Keresidenan Aceh, Sumatera Timur

dan Tapanuli. Upaya pembersihan terhadap kekuasaan para raja yang tidak menerima kemerdekaan, menjadi alasan bagi Persatuan Perjuangan melakukan penangkapan dan pembunuhan. Keberhasilan Persatuan Perjuangan sebelumnya dalam membersihkan kekuasaan para sultan di Aceh pada Desember 1945 dan Sumatera Timur Maret 1946, mendorong pasukan lainnya yang di Tapanuli untuk menghapus *kolonialis* dan *feodal* yang masih memegang jabatan di pemerintahan Republik di Tapanuli. Pasukan Persatuan Perjuangan Sumatera Timur dikirim ke Tapanuli yang juga berasal dari Tanah Karo dibawah pimpinan Tama Sebayang yang menjabat sebagai Ketua Persatuan Perjuangan Karo dan anak buah yang bernama Alimin Nainggolan (Langenberg 1976).

Revolusi sosial ini bisa mengarah pada perang saudara dan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Oleh karena itu, Keresidenan Tapanuli berusaha mencegah agar tidak meluas ke daerah lainnya di Tapanuli. Namun bulan April 1946 telah terjadi peristiwa berdarah. Para pemuda Pesindo telah melakukan penangkapan terhadap beberapa pimpinan KNI Tapanuli, pegawai-pegawai tinggi dan pemuka masyarakat dengan alasan dicurigai bersimpati kepada Belanda, kurang giat bekerja, ada yang tidak disukai oleh rakyat.

Persatuan Perjuangan dari Sumatera Timur datang ke Tapanuli untuk melakukan pembersihan. Muncul beberapa pernyataan bahwa kaum feodal harus dibasmi. Kaum yang dimaksud mengarah kepada kepala-kepala *kuria* atau kepala negeri yang selama ini mempunyai sebutan raja dan para Demang di zaman Belanda. Revolusi sosial diarahkan kepada para tokoh adat, pegawai negeri, anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), para tokoh agama dan anggota Kepolisian serta TRI. Pertumpahan darah terjadi di wilayah Dairi, Pangururan dan Balige yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa (Sinar 1971).

Pada 23 April 1946 peristiwa berdarah pembunuhan terjadi di Tarutung yang dilakukan oleh Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Raja Saul Lumbantobing beserta dengan pasukan Pesindo menangkap tokoh-tokoh penting Tapanuli antara lain tampak pada Tabel 2.

Selain itu, anggota Persatuan Perjuangan dari Aceh, Tanah Karo serta Sumatera Timur menyerang markas kompi TRI/Markas Polisi di Sidikalang. Pimpinan Persatuan Perjuangan dari Sumatera Timur dan Tanah Karo yang datang ke Sidikalang antara lain Marzuki Lubis sebagai ketua,

Alimin Nainggolan, dan Matang Sitepu (Husni 1983). Setelah menguasai Sidikalang kemudian pasukan tersebut menangkap dan menahan para pegawai lalu dipenjarakan. Beberapa nama yang tertangkap antara lain tampak pada Tabel 3.

Tabel 1. Daftar Wilayah Administratif Keresidenan Tapanuli

No.	Kabupaten	Kewedanan	Kecamatan	Nama Bupati/ Wedana dan Camat
1.	Sibolga	Sibolga Barus	Sibolga Lumut Barus Sorkam	Marah Halim Pohan D. E. Manuturi J. M. Hutabarat A. I. Sitompul M. H. Samosir Anwar Nasution Moh. Hilal
2.	Silindung	Tarutung Sarulla Sipahutar	Tarutung Sipoholan Pahae Julu Pahae Jae Pangaribuan Sipahutar	H. F. Situmorang N. T. Lumban Tobing M. D. Hutagalung J. F. Gultom A. Nainggolan H. Silitonga R. Saul Lumban Tobing M. Silitonga Cirus Hutabarat
3.	Humbang	Dolok Sanggul Siborong borong	Dolok Sanggul Onanghasang Pakkat Siborongborong Lintongnihuta Parmenangan Muara	Waldamar Hutabarat Chr. Lumbangaol Bahum Hutasoit Pipin Panjaitan J. Sihombing Ludin Sipahutar Gaju Purba Ignatus Hutasoit Lungkung Rajagukguk
4.	Toba Samosir	Balige Porsea Pangururan Onan Runggu	Balige Laguboti Silaen Porsea Lumbanjulu Parsoburan Pangururan Simanindo Palipi Onan Runggu	R. P. Natigor Lumban Tobing Isak Panjaitan Bismark Tambunan Batara Songty A. N. Muda Hormat Sirait B. Manurung Johannes Manurung Rumi Siagian Farel Pasaribu B.H Nainggolan Abner Situmorang Wismar Sidabutar A. Tamba B. Simbolon
5.	Sidikalang	Sidikalang	Sidikalang Sumbul	Jonathan Sitohang M. T. Ujung Mgr. L. Tobing

		Simsim	Salak Karajaan	Palikarpus Panggabean
		Tigalingga	Pinem	David Tarigan
6.	Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	Tiga Lingga Batang Toru P. Sidimpuan Angkola	Mula Siregar R. Marpaung A.Siahaan
		Sipirok	Sipirok ID. Hole	Marganti Siregar Koddin Batubara Bulkia Pakpahan
7.	Batang Gadis	Penyabungan	Siabu Penyabungan	R. Jungjungan Abdul Azis
		Kotanopan	Batang Natal	Tahiruddin Nusannif
		Natal	Kotanopan Muara Sipongi	B. Ananda M. Arif Dalimunte H. N. Nasution P. Naga
8	Gunungtua	Padang Bolak	Sipiongot Padang Bolak Barumun Tonga	Tuanku Muda Parlindungan Lubis H. Hasim Tuanku Somba Sabar Marisi Stn. Manjungkar Sth. K. D. Panusunan
		Sibuhuan	Sosa Barumun Sosopan	Husin Marahenus Sutan Solim
9	Nias	Nias Utara	Gunungsitoli Tohembowo Idanogawo Lahewa Lahusa	Rob. Telambanua L. Andries Asli Zebua Hairuddin Zalukhu Moh. Siddik Gea
		Nias Selatan	Teluk Dalam Lolowaoe Mandrehe Toeloe Batu	Kalinga Narebe Marondori A.W. Harefa Justinus Zebua Poehombowo Pangenas Harefa

Disadur dari Asnan 2007, 19.

Tabel 2. Daftar Tokoh yang Ditangkap

No	Nama Tokoh	Jabatan
1.	M. Nurdin	Kepala Polisi Residen Tapanuli
2.	Albert Kilian Sitompul	Wakil Kepala Polisi Tapanuli
3.	Elisa Siregar	Kepala Polisi Wilayah Silindung
4.	Osmar Simorangkir	Staf polisi Keresidenan Tapanuli
5.	Elias Hutabarat	Staf polisi Keresidenan Tapanuli
6.	Ibnu	Staf Polisi Keresidenan Tapanuli
7.	Panci Simatupang	Staf Polisi Keresidenan Tapanuli
8.	Mr. Rufinus Lumban Tobing	Anggota KNID Tapanuli
9.	Sutan Naga	Ketua KNID Tapanuli

10.	Majelis Hakim dan Hakim TRI	Para Majelis Hakim dan Hakim TRI
11.	Sutan Mangaraja Muda	Advokat untuk Tapanuli,
12.	Farel Pasaribu	Bupati Tapanuli
13.	Mangaradja Parlindungan	Mantan ketua Tapanuli Shu Sangikai
14.	Mangaradja Herman Hutabarat	Demang Balige
15.	Nawi Harahap	Pegawai sipil
16.	Jansen Tambunan	Anggota Kantor Residen Tapanuli
17.	Sutan Abdullah	Anggota Kantor Residen Tapanuli
18.	Gustaf Sihaaan	Anggota Kantor Residen Tapanuli
19.	Joeda Siregar	Anggota Kantor Residen Tapanuli
20.	Sutan Debata Oloan	Anggota Kantor Residen Tapanuli
21.	Samudin	Anggota Kantor Residen Tapanuli
22.	Patuan Malau	Mantan Pengawas Hutan Keresidenan Tapanuli
23.	Ahmad Daulay	Anggota Kantor Kemakmuran

Sumber: (Tobing 1997, 88).

Tabel 3. Daftar Tokoh Keresidenan Yang Tertangkap

No.	Nama yang tertangkap	Jabatan
1.	Elias Ujung	Kepala Negeri Sitolunempu
2.	Taip Maha	Kepala Negeri Siempatnempu
3.	Kisaran Maha	Anggota Kepala Negeri Siempatnempu
4.	Jonatahan Sitohang	Kepala Kampung Laehole
5.	Tertias Pasaribu	Pengetua HKBP
6.	Tohannis Sembiring	Kepala Negeri Tanah Pinem (Tigalingga)
7.	Rondonuhu	Agen Polisi
8.	Hendrik Sihombing	Komandan Pos Jaga
9.	Sijabat	Agen Polisi Lapangan
10.	Togatorop	Pendeta HKBP
11.	Israel Sianipar	Pedagang Sidikalang

Sumber: (Tobing 1997, 90).

Beberapa pejabat pemerintah daerah lainnya yang tidak ditangkap diberitahu bahwa mereka telah diberhentikan dari jabatannya. Setelah menguasai Sidikalang kemudian para Persatuan Perjuangan menangkapi 23 orang terdiri dari pegawai negeri. Para tawanan dimasukkan ke dalam penjara. Senjata dan perbekalan disita dari pos TRI, rumah para tahanan diledah dan menjarah sejumlah toko di kota di Keresidenan Tapanuli. Petani dan pedagang lokal yang lebih kaya dipaksa untuk membayar pajak dalam bentuk beras dan daging. Beberapa pejabat pemerintah lainnya diberhentikan dari pekerjaan (Eisenstadt 1984).

Di tengah masyarakat muncul gejolak antara pihak yang menghendaki perubahan, yang masih ingin menunggu kejelasan dari pihak Jepang dan

pihak yang menghendaki perubahan terutama mengakhiri segala bentuk penindasan. Peralihan kekuasaan yang berlangsung pasca proklamasi di tingkat daerah sudah tentu tidak dibekali atau didasarkan perangkat legal formal. Perebutan kekuasaan tidak berjalan dalam mekanisme demokrasi karena perangkat hukumnya tidak ada dan perubahan itu sendiri sedang dalam maksud membentuk prosedur. Kekerasan menjadi sarana utama diantara cara politik yang tersedia.

Proses perebutan kekuasaan yang berlangsung dapat dilihat sebagai tiga tahap yaitu pertama suatu proses dimana upaya menghancurkan simbol-simbol kekuasaan formal dilakukan terutama melalui aksi pelucutan pejabat lokal (setempat). Kedua, suatu proses dimana sumber-sumber ekonomi diambil alih terutama

dari kalangan pengusaha, tuan tanah atau orang kaya yang telah teredintifikasi bagian dari penguasa. Ketiga, suatu proses konsolidasi dalam hal ini dilakukan dua arah sekaligus yaitu upaya mengisi kekosongan jabatan, yang dalam masalah ini terjadi pula dinamika karena siapa yang duduk menjadi sangat penting dan upaya untuk melakukan konsolidasi legalitas terutama melalui jalan mencari dukungan dari apa yang diakui sebagai pusat kekuasaan (Imran 2012)

Para Barisan Laskar kemudian pergi ke daerah Samosir melakukan kekerasan, bentrokan pecah di beberapa wilayah yakni Kotacane, Barat Laut Tanah Karo, di Aceh antara wilayah Toba dan pemuda Aceh. Unit laskar rakyat (terutama dari Napindo dan Pesindo) dari Tanah Karo memutuskan untuk mengeksplor revolusi sosial ke Tapanuli untuk menghapus kolonialis dan feodal yang masih memegang jabatan di pemerintahan Republik di Tapanuli. Semua faktornya karena etnosentris, dan politik ideologi saling bekerja sama, saling memperkuat penyebaran kekerasan. Pembunuhan yang terjadi di Dairi dan Samosir terhadap raja-raja adalah puncaknya dari ketegangan yang tumpang tindih sebagai bukti bahwa pengaruh revolusi Sumatera Timur sudah mengalir ke daerah wilayah di Keresiden Tapanuli.

Revolusi sosial yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 di tiga daerah yaitu Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli menjadi suatu gambaran bahwa ketidaksiapan kaum bangsawan yang kehilangan sistem pemerintahan di saat Pemerintahan Belanda menjajah Indonesia. Sejak awal, Belanda menganggap penguasa pribumi penting sebagai pejabat yang mempertahankan hak-hak istimewannya, terutama kedudukan dalam adat kebiasaannya di mata rakyat. Bagi Belanda, Pangreh Praja adalah pegawai anti nasionalis yang mengendalikan keamanan dan ketertiban melalui jaringan mata-mata dan informan. Pada masa kolonial Belanda, Kepala Desa dan pamong desa bertugas sebagai pengumpul pajak. Kenaikan pangkat pangreh praja tergantung pada laporan dan penilaian atas kemampuannya mengumpulkan pajak, kemampuan mengelola administrasi dan mengawasi kriminalitas.

Penyelesaian Konflik Berdarah Tapanuli

Peristiwa berdarah yang terjadi di Tapanuli telah memakan korban jiwa baik di pihak pemerintah maupun kelompok Persatuan Perjuangan atau Pesindo. Oleh karena itu, peristiwa ini telah mengundang perhatian semua pihak, baik pemerintah sipil maupun dan komando TRI di Tarutung yang menjadikan peristiwa tersebut sebagai pemberontakan terbuka. Angkatan Darat dan Satuan polisi di Tarutung dan Siborongborong dikerahkan dan dikirim untuk membersihkan para pemberontak di Samosir dan Dairi (Castles 2001).

Setelah mengetahui pembunuhan di Sidikalang yang dipelopori oleh Persatuan Perjuangan/Pesindo, maka Ferdinand Lumbang Tobing sebagai gubernur militer Tapanuli mengadakan rapat kilat KNI untuk musyawarah hal-hal penting dengan keputusan sebagai berikut: (1) Pasukan resmi dan tidak resmi yang datang dari Sumatera Timur yang telah masuk ke wilayah Tapanuli tanpa izin serta membuat hal-hal yang diluar hukum maka dalam tempo 2 x 24 jam harus keluar dari daerah hukum pemerintahan Tapanuli; (2) Jika tidak diindahkan maka pemerintah Tapanuli akan mengambil tindakan untuk melaksanakan instruksi itu secara sepihak dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab pendatang; (3) Pada malam itu juga harus berangkat utusan untuk melaksanakan instruksi tersebut yaitu; (a) sebanyak dua orang wakil dari ketentaraan TRI Divisi VI yaitu Tengku Lah Husny, Kapten Kepala Geni/Perhubungan Divisi VI sebagai ketua rombongan dan M. Hutabarat, Letnan Dua dari Polisi tentara Divisi VI sebagai anggota; (b) sebanyak satu orang wakil dari pemerintahan Tapanuli yaitu Sdr. A. Hutabarat dari bagian pemerintahan; (c) sebanyak dua orang wakil dari Persatuan Perjuangan Tapanuli; (d) sebanyak satu kompi TRI Divisi VI dibawah pimpinan komando Kapten Jansen Siahaan sebagai pengawas (Basri 1958).

Pada malam hari, tim delegasi pemerintah Tapanuli berangkat ke Sidikalang untuk melaksanakan tugasnya. Ketika tiba di Samsosir, ketua rombongan mendapat laporan lewat telepon dari Komandan Pasukan TRI yang ada di Pangurusan bahwa Persatuan Perjuangan dari Sumatera Timur telah menembaki pasukan TRI dengan tidak mengindahkan Instruksi Gubernur Militer Tapanuli. Tim delegasi tiba di Sidikalang

pada esok harinya. Setelah mengirim utusan kepada Persatuan Perjuangan dari Sumatera Timur maka diperoleh berita bahwa para pendatang bersedia mengadakan pertemuan pada hari itu juga. Pihak pendatang di ketuai oleh Marzuki Lubis sebagai anggota Persatuan Perjuangan Sumatera Timur, kemudian anggota Persatuan Perjuangan dari Tanah Karo dan TRI. Ketua delegasi Tapanuli memimpin pertemuan dan tercapai hasil sebagai berikut: (1) Pasukan Persatuan Perjuangan di pagi hari akan meninggalkan daerah Tapanuli selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam terhitung selesainya rapat diatas; (2) Semua senjata tentara dan polisi Sidikalang akan dikembalikan setelah rapat; (3) Semua tawanan/tahanan yang ada pada pasukan Persatuan Perjuangan akan diserahkan kepada Tim delegasi pemerintah Tapanuli untuk segera dibebaskan; (4) Jika mematuhi ketiga keputusan di atas, maka tim delegasi tidak akan melakukan hukum.

Letnan Dua Matang Sitepu melapor kepada ketua delegasi Kapten Lah Husni bahwa Matang Sitepu dapat telepon dari anggota Maruzuki Lubis dari daerah Merek agar semua tawanan malam itu juga dibawa dari Sidikalang ke Kabanjahe. Instruksi tersebut telah diperketat, penjagaan terhadap para tawanan agar tidak melarikan diri. Marzuki Lubis memberikan instruksi yang bertentangan dengan hasil keputusan rapat. Pada saat Persatuan Perjuangan Sumatera Timur berkuasa di Sidikalang, ketua tim delegasi Tapanuli sempat menjumpai beberapa penduduk Kota Sidikalang yang menyatakan bahwa rombongan dari Sumatera Timur telah mengangkat empat orang penduduk Sidikalang sebagai dewan pemerintahan harian yang terdiri dari rakyat biasa diantaranya: (1) Raja Kisaran Maha (PNI); (2) K. Matondang, Montir/masinis perusahaan listrik Sidikalang; (3) Konstan Pakpahan seorang tukang besi di Sidikalang; (4) Manat Sitanggang, supir bus.

Meskipun para dewan pemerintahan tidak sempat melaksanakan tugasnya namun mereka ditunjuk tanpa melalui musyawarah. Penduduk menerima secara terpaksa karena takut disebut sebagai agen NICA. Semua kejadian tersebut dilaporkan kepada Komandan Resimen Barita Sinambela yang telah bersiap-siap dari Siborong-borong untuk mengirim bantuan penggempur ke Sidikalang dan Samosir. Setelah kedatangan TRI

terjadi pertempuran fisik di daerah Sidikalang, Tigalingga dan Lau Gunung. Beberapa pemimpin Persatuan Perjuangan dari Sumatera Timur, ada yang berhasil meloloskan diri dari Sidikalang namun sebagian pasukan seperti Matang Sitepu dan pasukanya Teuku Daud dan beberapa anak buahnya berhasil di tawan dan dibawa ke Pematangsiantar karena seluruh persoalan di daerah Tapanuli diambil alih oleh Gubernur Sumatera.

Pada saat yang sama, keluarga mereka yang ditahan di Balige mendesak agar pembalasan pemerintah diambil terhadap kepemimpinan Pesindo. Pada 4 Mei 1946, pasukan TRI dan Brimob menyerang basis pemberontak Pangururan, Samosir. Setelah beberapa saat, pertempuran sengit, tiga dari laskar yang bertahan terbunuh dan 47 terluka, pasukan pemerintah menduduki kota Pangururan. Sebanyak 121 pemberontak laskar rakyat ditangkap dan dibawa ke Tarutung untuk pengasingan. Kepala desa yang ditahan dalam serangan pemberontak sebelumnya dibebaskan, meskipun beberapa raja yang digulingkan, sementara kepala negeri dan pegawai negeri diberangkatkan ke Tarutung bersama para laskar yang ditangkap.

Pada 13 Mei 1946, pemimpin senior Pesindo Tarutung dan Siborongborong, termasuk Raja Saul Lumbantobing dan penasihat utamanya Parhusa Panggabean (mantan Kepala Negeri Sitompul Panggabean) ditangkap oleh TRI. Keesokan harinya pasukan Pesindo menyerang markas TRI di Tarutung. Namun, pasukan Pesindo tersebut dengan mudah dikalahkan dan 20 laskar ditangkap. Pada Akhir Mei 1946 Mas Kadiran Kepala Bagian Istimewa Kepolisian Tapanuli mendapat perintah dari Residen Lumban Tobing untuk berangkat ke Pangururan, Samosir untuk mengamankan para Kepala Negeri dari pembunuhan orang-orang yang menamakan diri laskar rakyat (Merdeka 1946).

Mas Kadiran berangkat dengan membawa tiga saksi anak buah ke Pangururan setelah terlebih dahulu singgah di Balige untuk bertemu Letkol. Jansen Siahaan sebagai Komandan Resien III TRI Brigade XI Tapanuli. Pasukan Mas Kadiran bersama Kepala Polisi Umum Pangururan Edward Ismael Sinagabariang dapat melumpuhkan laskar

rakyat yang dikenal sebagai pengacau pimpinan Alimin Nainggolan.

Perjalanan dari Pangurusan dilanjutkan ke Sidikalang yang dipimpin oleh Elisa Siregar, Komisarisi Polisi Kelas II dan Maruli Hutabarat Ajun Inspektur Polisi Kelas I bersama pasukan Resimen III Brigade IX Tapanuli. Pasukan Brigade IX terus menumpas lascar rakyat. Pada peristiwa di Sidikalang telah memakan korban dengan gugurnya Gustaf Sibarani, Kepala Seksi I Barisan Polisi Istimewa Tapanuli. Selain penyelesaian secara perang terhadap para pengacau, di Dairi juga dilakukan penyelesaian secara adat yang dihadiri para penatua adat, pemerintah dan TRI yang bertempat di Tiga Lingga. Sebagai tanggapan TRI membebaskan semua yang ditangkap sejak penghancuran pemberontakan. Pada 20 Mei 1946 unit TRI melakukan serangan balik, meluncurkan serangan besar penyerangan terhadap Sidikalang dan menduduki kota setelah pertempuran singkat yang penuh kekerasan.

Sekitar 50 pemuda pemberontak, bersama pejabat baru yang dilantik sejak 29 April 1946 ditangkap. Pasukan TRI kemudian menyerang Tiga Lingga dan merebut kota setelah beberapa pertempuran sengit. Beberapa dari Pesindo Karo di sana ditangkap, meskipun mayoritas mundur melintasi perbatasan ke Tanah Karo. Pada saat yang sama waktu pasukan TRI menduduki markas Pesindo di Merek (Tanah Karo) di persimpangan antara Sidikalang, Kabanjahe dan Siantar, menghentikan semua lalu lintas antara Dairi dan Medan. Pasukan Pesindo yang ditangkap di bawa ke Tarutung untuk penyelidikan lebih lanjut. Pertempuran di Dairi selama bulan Mei 1946 telah membentuk konflik antar etnis berdarah secara keseluruhan sekitar 300 orang tewas dan sekitar 700 orang terluka (Kipp 1990).

Ketegangan antar etnis antara masyarakat Toba dan non-Toba di Dairi berada di puncak. Begitu juga antara Toba dan Aceh, Toba dan Karo di seluruh Sumatera Utara. Dari Siantar, Gubernur Hasan dan Komando TRI seluruh Sumatera turun tangan. Sebuah komisi pemerintah khusus dibentuk di bawah pimpinan mantan Demang Tarutung, Cornelis Sihombing dan diberangkatkan ke Sidikalang untuk merundingkan gencatan senjata antara kelompok-kelompok yang bertikai. Pada Juni 1946 setelah sekitar satu minggu

berdiskusi dengan tokoh masyarakat Toba, Pakpak dan tokoh masyarakat Karo di Sidikalang, komisi mampu untuk merundingkan kesepakatan tentang penyelesaian damai formal. Sebuah upacara adat diatur yang melibatkan ritual pemotogan kerbau dan para pemimpin dari tiga komunitas makan bersama-sama untuk melambungkan berakhirnya konflik.

Simpulan

Pada masa kolonialisme di Indonesia, bangsawan dan keluarga para raja menjadi mitra penjajah. Selain itu, pangreh praja dan kaum terdidik diangkat menjadi pegawai negeri dan kepala negeri pada Keresidenan Tapanuli untuk membantu pemerintah Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan serta berlaku tidak adil kepada rakyat. Tindakan tersebut menimbulkan dendam bagi rakyat. Kebencian terhadap kepala negeri dan para pegawai semakin memuncak setelah proklamasi dikumandangkan ditengah pemerintahan yang belum stabil dan datangnya sekutu ke menimbulkan masalah baru awal kemerdekaan.

Para pemuda yang tergabung dalam berbagai badan perjuangan mengambil bagian dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Di sisi lain badan perjuangan tersebut juga ingin membersihkan pengaruh penjajah yang ada pada kepala negeri dan para pegawai. Adapun badan perjuangan yang dibentuk untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut sekaligus membersihkan pengaruh penjajah pada pemerintahan antara lain, Nasionalis Pemuda Indonesia (NAPINDO), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan Persatuan Perjuangan. Kehadiran badan perjuangan ini telah menimbulkan peristiwa berdarah di Tapanuli yang merupakan imbas dari revolusi sosial Aceh dan Sumatera Timur. Para pelaku revolusi sosial telah berhasil melakukan pembunuhan, perampasan kepada para raja dan keluarganya.

Dengan alasan para pejabat baik pegawai negeri, kepala kampung, anggota KNI maupun anggota TRI dianggap kaki tangan Belanda sehingga harus di tangkap di bunuh. Persatuan Perjuangan telah berhasil melakukan kekacauan dan pembunuhan di beberapa wilayah Tapanuli

seperti, Sidikalang, Samosir, Tarutung dan Balige. Untuk menyelesaikan peristiwa berdarah Tapanuli, Residen Ferdinand Lumban Tobing sebagai panglima militer di Tapanuli melakukan rapat Bersama KNID. Peristiwa Revolusi Berdarah di Tapanuli apabila di komparasikan memiliki keunikan tersendiri daripada peristiwa Revolusi di Sumatera Timur dan Aceh dalam segitu penyelesaian konflik. Di daerah lain ketegangan terus berlanjut pasca revolusi sosial 1946, namun di Tapanuli akhirnya diputuskan penyelesaian konflik berdarah secara perang yang dipimpin oleh TRI dan secara adat istiadat. Pengiriman pasukan dilakukan ke wilayah pusat konflik. Para tahanan berhasil dibebaskan kemudian para pemberontak ditangkap dan diadili termasuk Tama Sebayang dan Alimin Nainggolan tertangkap dan di bawa ke Sibolga, sedangkan penyelesaian secara adat dilakukan lewat penyembelihan kerbau dan makan bersama yang dilakukan di Sidikalang.

Peristiwa konflik berdarah di Tapanuli pada masa Revolusi merupakan peristiwa yang sangat penting dalam perkembangan sejarah lokal, dalam hal ini tentunya banyak terjadi dinamika dalam berbagai aspek bidang yang menjadi faktor pendukung jalannya konflik serta resolusi yang dilakukan. Namun, salah satu hal yang menjadi pemicu konflik di wilayah Tapanuli ini yaitu sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang terdengar hingga ke pelosok negeri sampai ke Tapanuli, telah membangkitkan semangat revolusi dan menyatukan golongan masyarakat untuk melakukan dekolonisasi. Proklamasi membangkitkan nasionalisme di kalangan masyarakat yang sebelumnya tertindas akibat kolonialisme.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini adalah bagian dari tesis pada program Pascasarjana Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

Referensi

Agustono, Budi, dkk. 2019. *Kopi Mandailing kebijakan ekonomi kolonial Belanda dalam eksploitasi kopi di Kresidenan Tapanuli (1841-1928)*. Yogyakarta: Ombak

- Asnan, Gusti. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak.
- Bottomore, B. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Institut Akbar Tanjung.
- Castles, Lance. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Kresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fahsin, M. Fa'al. 2010. *Negara dan Revolusi Sosial*. Yogyakarta: Resist Book.
- Halimiatiy, Maya 2008. *Pers Tapanuli 1945-1950* (Skripsi) Medan: Departemen Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara.
- Husni, M. Lah. 1983. *Revolusi Sosial di Sumatera Timur dan Tapanuli*. Medan: t.p.
- Ihsanudin. 2010. *Tan Malaka dan Revolusi Proletar*. Yogyakarta: Resist Book.
- Kahin, Mc. Turnan. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kipp, Rita Smith. 1990. *The Early Years of A Dutch Colonial Mission The Karo Field*, Ann Arbor : The University of Michigan Press.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
- Poeze, A Harry. 2008. *Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, Jilid 1: Agustus 1945-Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, Anthony. 2012. *Sumatera Revolusi dan Elit Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ricklef, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rocamora, Eliseo J. 1991. *Nasionalisme Mencari Ideologi Bangkit dan Runtuhnya PNI 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Birokrasi Tradisional Dari Satu Kerajaan Di Sumatera. Harajaon Batak Toba*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga tahun 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sinar, T. Luckman. 1971. *Sari Sedjarah Serdang*. Medan.

- Tobing, H. Afif Lumban. 1997. *Pahlawan Kemerdekaan Dr. Ferdinand L.Tobing*. Jakarta: Dwi Grafika.
- Utomo, Cahyo Budi. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang.
- Wahyuni, Murni. 2019. *Siak Masa Revolusi 1945-1945 (Tesis)*. Medan: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.